

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk pemulihan hak-hak dasar manusia mantan penganut *Syi'ah* Kabupaten Sampang, konflik beragama yang terjadi antara *Sunni* dan *Syi'ah* merupakan sebuah konflik berkepanjangan sehingga mengakibatkan hilangnya hak atas rasa aman untuk penganut *Syi'ah*. Setelah sebelas tahun diungsikan akhirnya penganut *Syi'ah* bersedia untuk mengucapkan ikrar kembali menjadi *Sunni* dengan cara dibaiat untuk dapat pulang ke Kabupaten Sampang pada tahun 2022 dan berangsur hingga tahun 2023. Kembalinya mantan penganut *Syi'ah* tentunya juga perlu dipulihkan kembali hak dasar manusia salah satunya hak atas rasa aman dalam tatanan masyarakat pasca konflik di kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini untuk pemulihan hak atas rasa aman dalam bermasyarakat mantan penganut *Syi'ah* yang telah kembali kepada kampung halamannya tanpa diskriminasi dalam masyarakat sehingga menjadi urgensi untuk mengetahui efektivitas Pasal 35 UU HAM dalam lingkungan mantan penganut *Syi'ah* Sampang dalam adanya gangguan hak terhadap rasa aman dan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas rasa aman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengetahui efektivitas Pasal 35 UU HAM berkaitan dengan pemulihan hak dasar manusia hak atas rasa aman dalam tatanan masyarakat mantan penganut *Syi'ah* dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji aturan hukum dalam peristiwa dimasyarakat (*Law in Action*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gangguan atas rasa aman mantan penganut *Syi'ah* yang dilakukan oleh TIM 5 dan masyarakat melalui pengawasan terhadap kegiatan beribadah dan bermasyarakat mantan Penganut *Syi'ah* sehingga pengawasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik baru. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar manusia termasuk hak atas rasa aman mantan penganut *Syi'ah* dengan melalui pembentukan Surat Keputusan Bupati berkaitan dengan jaminan hidup, bantuan Pembangunan rumah dan pembentukan tim rekonsiliasi yang diperbarui setiap tahunnya, namun pembentukan tim rekonsiliasi yang memberikan tugas pengawasan kepada mantan penganut *Syi'ah* mengesampingkan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi keamanan mantan penganut *Syi'ah* pasca konflik, sehingga pemenuhan hak atas aman mantan penganut *Syi'ah* yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak optimal.

Kata Kunci: Hak Atas Rasa Aman, Mantan Penganut *Syi'ah*, Kabupaten Sampang

ABSTRACT

This research was conducted to restore the fundamental human rights of former Shia adherents of Sampang Regency. The religious conflict that occurred between Sunni and Shia was a prolonged conflict that resulted in the loss of fundamental human rights for Shia adherents. After eleven years of evacuation, finally, the Shia adherents are willing to take the pledge to return to being Sunni by being blessed to be able to return to Sampang Regency in 2022 and gradually until 2023. The return of former Syiah adherents certainly also needs to be restored to fundamental human rights, including the right to a sense of security in the post-conflict society in Sampang Regency. The purpose of this research is to restore the right to security in the society of former adherents of Shi'a who have returned to their hometown without discrimination in society, so it becomes urgent to know the effectiveness of Article 35 Law Human Rights in the environment of former adherents of Shi'a Sampang in the presence of disturbance of the right to security and government efforts in the fulfilment of the right to security.

This research uses empirical legal research methods to determine the effectiveness of Article 35 of the Law of Human Rights relating to the restoration of basic human rights to the right to security in the community order of former adherents of Shi'a. It uses a legal sociology approach to examine the rule of law in events in society.

The research results show a disturbance in the sense of security of former Shia adherents conducted by TIM 5 and the community through supervision of worship and social activities of former Shia adherents, so the supervision can potentially lead to new conflicts. The Regional Government of Sampang Regency strives for the fulfilment of fundamental human rights, including the right to security of former Shia adherents through the establishment of the Regent Decree relating to life insurance, assistance in the construction of houses and the formation of a reconciliation team that is updated annually. Still, the formation of a reconciliation team that provides supervisory duties to former Shia adherents overrides the obligations of local governments in the implementation of post-conflict rehabilitation of security of former Shia adherents so that the fulfilment of the right to security of former Syiah adherents provided by the local government is not optimal.

Keywords: *Right to Security, Former Shi'a Believers, Sampang Regency*